

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kota Kediri

Kota Kediri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Kediri dengan luas wilayah 63,40 km² terbelah oleh sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 kilometer. Luas wilayah Kota Kediri sekitar 63,40 km² atau (6.340 ha) yang terdiri atas 3 Kecamatan dan 46 kelurahan. Dan merupakan kota sedang di Provinsi Jawa Timur. Dan berpenduduk sekitar 293.282 jiwa (2014). Berikut adalah luas Kota Kediri dirinci menurut per kecamatan :

1. Kecamatan Kota : 14,90 km²
2. Kecamatan Mojoroto : 24,60 km²
3. Kecamatan Pesantren : 23,90 km²

Terletak di daerah yang dilalui Sungai Brantas dan di antara sebuah lembah di kaki gunung berapi, Gunung Wilis dengan tinggi 2552 meter. Kota berpenduduk 312.000 (2012) jiwa ini berjarak ±128 km dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur terletak antara 07°45'-07°55'LS dan 111°05'-112°3' BT. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. (Laporan Kinerja Tahunan, 2015).

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan Kec. Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m). Kota Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara: Kecamatan Gampengrejo dan Banyakan.
2. Sebelah selatan: Kecamatan Kandat, Ngadiluwih, dan Semen.
3. Sebelah timur: Kecamatan Wates dan Gurah.
4. Sebelah barat: Kecamatan Banyakan dan Semen. (Laporan Kinerja Tahunan 2015).

Jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2015 sebesar 293.282 jiwa, yang terdiri dari 147.417 jiwa penduduk laki-laki dan 145.865 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 3 kecamatan. Jumlah Ini mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 267.310 jiwa atau naik sebesar 9,7%. Angka kepadatan penduduk mencapai 4.625 jiwa/km² juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 4.216 jiwa/km². Sedangkan, untuk angka *sex ratio* (perbandingan jenis kelamin) tahun 2015 adalah 101,06 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak

dibandingkan dengan penduduk perempuan. Menurut sebarannya, jumlah penduduk Kota Kediri ada di Kecamatan Mojoroto yaitu sebanyak 112.685 jiwa dan terendah di Kecamatan Pesantren sebanyak 86.899 jiwa. Sesuai kebijakan pemerintah pusat terhadap penertiban dokumen kependudukan, Pemerintah Kota Kediri sudah berhasil menyelesaikan proses administrasi *e-KTP* (KTP elektronik) dan melaporkan kepada Kementrian Dalam Negeri agar dapat dicetakan KTP elektronik. (Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2014).

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Mojoroto	112.685	4.166
2	Kota	93.698	5.756
3	Pesantren	86.899	3.306
	Jumlah 2015	293.282	4.625
	2014	267.310	4.216
	2013	260.297	4.105
	2012	302.672	4.774

Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2014

Berikut peta daerah Kota Kediri:



Gambar 4.1 Peta Kota Kediri

2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

a. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Terwujudnya pemenuhan hak atas pangan secara berkelanjutan berbasis pada sumber daya lokal untuk menuju masyarakat sejahtera”

Misi

- 1) Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat individu, dan wilayah melalui pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat, kelurahan dan pemerintah.
- 2) Memantapkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mengantisipasi kerawanan pangan.
- 3) Mewujudkan aksesibilitas pangan di masyarakat melalui pengembangan distribusi dan akses pangan.
- 4) Mewujudkan pengawasan dan keamanan pangan yang mantap dengan didasari profesionalisme.

Tujuan

1) Misi 1

Memantapkan ketersediaan pangan ditingkat individu, dan wilayah melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat, kelurahan dan pemerintah, ditetapkan satu tujuan yaitu : ” Memantapkan ketersediaan pangan sesuai dengan potensi yang ada”.

2) Misi 2

Memantapkan konsumsi pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mengantisipasi kerawanan pangan, ditetapkan tujuan, yaitu : ”Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber pangan lokal

yang Beragam, Bergizi, Seimbang Aman dan Halal disamping juga efisiensi untuk mencegah ketergantungan terhadap satu jenis pangan tertentu dan mencegah pemborosan”.

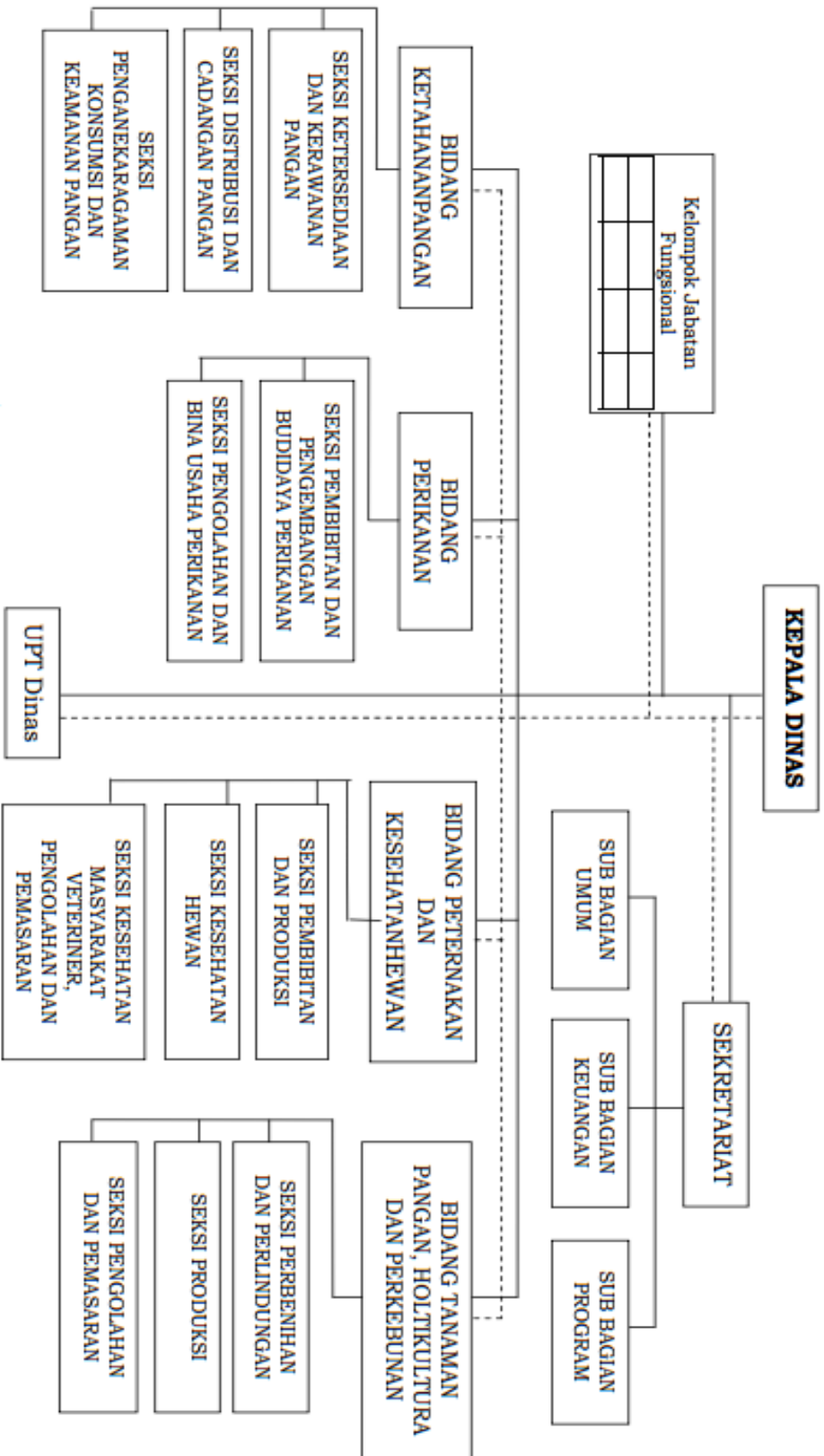
3) Misi 3

1. “Meningkatkan Ketersediaan informasi pasokan, harga, akses pangan dan distribusi pangan dalam dan antar daerah untuk mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga pangan”, Memiliki pengertian bahwa peningkatan informasi pasokan harga dan distribusi pangan diharapkan mampu menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan.
2. “Mengurangi tingkat kelaparan masyarakat dan daerah rawan pangan” Mempunyai pengertian bahwa dengan peningkatan informasi dan distribusi pangan akan menciptakan kondisi harga yang stabil dan memudahkan masyarakat dalam mengakses pangan, yang diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat kelaparan dan daerah rawan pangan.

4) Misi 4

Mewujudkan pengawasan dan keamanan pangan yang mantap dengan didasari profesionalisme, ditetapkan satu tujuan, yaitu :
”Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang keamanan pangan serta pemahaman tentang implikasi hukum pelanggaran peraturan keamanan pangan yang berlaku”.

b. Struktur Organisasi



Bagan 4.1 Struktur Organisasi

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pangan, pertanian dan perikanan dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
4. pelaksanaan administrasi kedinasan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas Pokok

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

b. Fungsi

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
3. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahanbidang pangan, pertanian dan perikanan; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan Pangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

b. Fungsi

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi

- pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 4. pemberian pendampingan, bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 5. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 6. penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perikanan

a. Tugas Pokok

Penyiapan koordinasi,fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi sertapelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecilpembudidayaan ikan.

b. Fungsi

1. penyusunan kebijakan dibidang pembibitan, produksi perikanan, perlindungan dan pengendalian penyakit, serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perikanan budidaya;
2. pengelolaan sumber daya genetik ikan;
3. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ikan;
4. pengendalian penyakit ikan;
5. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi pembibitan ikan, pakan ikan dan obat-obatan ikan;
6. pengawasan pemasukan dan pengeluaran ikan, dan produk ikan;
7. pemberian rekomendasi teknisdibidang perikanan;
8. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perikanan; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Fungsi

1. penyusunan kebijakan dibidang pembibitan, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
2. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
3. perencanaan kebutuhan dan penyediaan pembibitan ternak, pakan ternak, dan pembibitan hijauan pakan ternak;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
5. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6. pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
7. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. pelaksanaan rekomendasi teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

9. pemberian rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 10. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 11. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - b. Fungsi
 1. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 2. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 3. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. pemberian rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sumber Daya Aparatur

SDM Kantor Ketahanan Pangan sampai pada akhir tahun 2015 jumlahnya menjadi 22 Orang, yang berasal dari mutasi pegawai SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dan luar kota kediri. Komposisi pegawai Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Administrasi Kepegawaian

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
A	Berdasarkan Status :		
- PNS	Orang	22	

- Honorer Daerah (Honda)	Orang	0	
Jumlah	Orang	22	
B.	Menurut Golongan :		
- Golongan IV	Orang	2	
- Golongan III	Orang	10	
- Golongan II	Orang	9	

- Honda	0		
C.	Berdasarkan Pendidikan :		
- Sarjana Strata II (S2)	Orang	4	
- Sarjana Strata 1 (S1)	Orang	7	
- Sarjana Muda / D3	Orang	2	
- SLTA	Orang	8	
- SLTP	Orang	1	
- SD	Orang	0	
D.	Pejabat Struktural :		
- Eselon III	Orang	1	
- Eselon IV	Orang	4	
Pejabat Fungsional Perencanaan :	Orang	-	
E.	Yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan :		
- SPAMEN	Orang	0	
- Diklat PIM III	Orang	2	
- Diklat PIM IV	Orang	3	
- Golongan I	Orang	1	

Sumber: LAKIP Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015

e. Data Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Kediri

Tabel 4.3 Data KRPL Kota Kediri

No.	KELURAHAN	NAMA KELOMOK	TAHUN
1.	Ketami	Flamboyan I	2013
2.	Lirboyo	Lestari	2012
3.	Rejomulyo	Melati	2012
4.	Bangal	Nusa Indah	2013

5.	Banaran	Nawang Wulan I	2013
6.	Jamsaren	Mawar	2013
7.	Gayam	Ngudi Makmur	2014
8.	Ngampel	Ngampel Hijau Lestari	2014
9.	Sukorame	Sruni	2014
10.	Ngampel	Ngampel Bunga Lestari	2015
11.	Pojok	Agro Wilis	2013
12.	Mrican	Sapto Aro Sari	2013
13.	Banjarmlati	Melati Jaya	2013
14.	Semampir	Segoro Artho	2013
15.	Ngronggo	Srikandi	2013
16.	Manisrenggo	RA Kartini	2013
17.	Rejomulyo	Berkah	2013
18.	Betet	Menur I	2013
19.	Banaran	Nawang Wulan II	2013
20.	Tempurejo	Putri Mandiri	2013
21.	Ketami	Flamboyan II	2013
22.	Tosaren	Dewi Sri	2013
23.	Ngeltih	Pamor Lestaro	2014
24.	Tinalan	Harum Lestari	2014
25.	Singonegaran	Srikandi	2014
26.	Balabak	Sawo Manila	2014

27.	Bandar Kidul	Rahayu	2015
28.	Dermo	Karso Tani	2015
29.	Bawang	Sarang Cinta	2015
30.	Pesantren	Indah Lestari	2015
31.	Ngronggo	Sekartaji	2016
32.	Kaliombo	Kaliombo Asri	2016
33.	Rejomulyo	Delima	2016
34.	Manisrenggo	Sakinah	2016
35.	Pakunden	Sekar Melati	2016
36.	Pojok	Dewi Kilisuci	2016
37.	Singonegaran	Cendana Asri	2016
38.	Gayam	Bumi Sejahtera	2016
39.	Ngampel	Trubus 04	2016

Sumber: Dokumen Kantor Ketahanan Pangan 2016

Dari 49 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang ada di Kota Kediri, yang masih bertahan sampai dengan tahun 2017 ada 18 KRPL dan salah satunya adalah KRPL Melati Kelurahan Rejomulyo yang di bentuk pada tahun 2012. Berikut data KRPL yang masih aktif di tahun 2017:

Tabel 4.4 Data KRPL Kota Kediri 2017

No.	NAMA KRPL	KELURAHAN
1.	Srikandi	Singonegaran
2.	Sekar Melati	Pakunden

3.	Flamboyan	Ketami
4.	Sarang Cinta	Bawang
5.	Sawo Manilo	Blabak
6.	Jolo Artho	Manisrenggo (Baru)
7.	Delima	Rejomulyo
8.	Melati	Rejomulyo
9.	Sekartaji	Manisrenggo (Baru)
10.	Kaliombo Asri	Kaliombo
11.	Subur Makmur	Setono Gedong (Baru)
12.	Segoro Artho	Semampir
13.	Dewi Kilisuci	Pojok
14.	Bumi Sejahtera	Gayam
15.	Trubus 04	Ngampel
16.	Karso Tani	Derma
17.	Mrican Asri	Mrican (Baru)
18.	Sapto Argo	Mrican

Sumber: Dokumen DKPP Kota Kdri 2017

B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

a. Organisasi Pelaksana Kebijakan

Organisasi merupakan suatu unsur yang penting dalam sebuah pelaksanaan atau penerapan sebuah kebijakan, karena dengan dibentuknya organisasi maka akan berpengaruh pada

pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) itu sendiri. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri yang dalam hal ini memiliki program yang salah satunya adalah program untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan KRPL. Dalam pengembangan KRPL yang dilakukan, DKPP akan membentuk organisasinya terlebih dahulu yang anggotanya diambil dari ibu-ibu yang masuk dalam kelompok dasawisma didampingi oleh Petugas Pelaksana Lapangan (PPL) yang telah ditugaskan di setiap kelurahan yang ada di Kota Kediri. Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok dasawisma akan dibuatkan organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT) yang akan menjalankan program KRPL di masing-masing kelurahannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriyono selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut:

“Pelakunya kelompok masyarakat mas, ibu-ibu dalam dasawisma dalam kordinasi timnya tim penggerak PKK kelurahan. Kemudian dibuatkan organisasi KWT mas yaitu Kelompok Wanita Tani. Untuk pembinanya masing-masing PPL pertanian yang ada di masing-masing kelurahan (wawancara pada tanggal 7 September 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).”

Pelaku dari program KRPL adalah ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok dasawisma. Kelompok dasawisma merupakan kelompok yang terdiri dari 10 rumah yang masing-masing rumah membuat RPL (Rumah Pangan Lestari), karena untuk membuat sebuah

Kawasan Rumah Pangan Lestari minimal harus ada 10 rumah yang sudah menjalankan RPL. Kemudian ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok dasawisma membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dijadikan sebagai organisasi dalam menjalankan program KRPL. Pernyataan Bapak Yudhi Agustriano tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri, sebagai berikut:

“Itu yang menjadi sasaran dasawisma mas, itu sekitar 10 rumah atau keluarga, dengan harapan kalau seperti itu kan ada kerjasama ya dengan kelompok kecil itu. Kalau sendiri kan mungkin sulit, lebih baik bersama kan seperti itu. Sasarannya itu, terutama yang ibu ibu KWT itu kan adalah kelompoknya, KRPL itu adalah lingkup karena kawasan (wawancara pada tanggal 27 September 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).”

Dengan adanya kelompok dasawisma yang kemudian tergabung dalam organisasi KWT diharapkan antar rumah yang menerapkan Rumah Pangan Lestari (RPL) bisa saling bekerjasama sehingga bisa mewujudkan sebuah Kawasan Rumah Pangan Lestari, karena KRPL itu sendiri merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari minimal 10 rumah. Pernyataan dari Ibu Sumarsih tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Yulianto selaku Petugas Pelaksana Lapangan yang bertugas di Kelurahan Rejomulyo, sebagai berikut:

“dibentuk kelompok wanita tani (KWT) terus untuk melaksanakan kegiatan. Tahun 2012 KWT yang kita bentuk adalah Barokah (KRPL Barokah) jadi untuk mendapatkan atau melaksanakan KRPL itu diwadahi dalam KWT, yang pertama pada tahun 2012 itu. Kemudian untuk

pembentukan kita berkoordinasi dengan RT setempat dan tokoh tokoh masyarakat, kemudian kita kumpulkan ibu ibu yang akan menerima bantuan itu kita wadah dalam KWT. Kemudian kita bentuk kepengurusan, kita dampingi, saya selaku pendamping kemudian setelah terbentuk dibuatkan SK dari kelurahan. Kemudian setelah itu kita berikan penyuluhan tentang program KRPL dan bagaimana tata cara pengelolaannya (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL Melati Rejomulyo).”

Kelompok Wanita Tani (KWT) dibentuk sebagai wadah untuk melaksanakan program KRPL. Pembentukan KWT itu sendiri juga melibatkan Ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah setempat, selain itu dalam pembentukan KWT juga didampingi oleh PPL dari DKPP. Setelah KWT terbentuk, kelurahan setempat harus membuatkan Surat Keputusan (SK) agar KWT yang telah terbentuk diakui keberadaannya, baru setelah itu PPL memberikan penyuluhan tentang program KRPL dan juga tata cara pengelolaannya. Dari pernyataan Bapak Yudhi Agustriyono, Ibu Sumarsih, dan Bapak Yulianto dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan atau menerapkan program KRPL di setiap kelurahan harus ada organisasinya terlebih dahulu, yaitu dengan membentuk Kelompok Wanita Tani.

Pada sebuah organisasi di dalamnya juga terdapat unsur-unsur yang menunjang jalannya organisasi dan juga akan menentukan maju atau tidaknya sebuah organisasi. Maju atau tidaknya organisasi juga akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi, unsur-unsur yang mempengaruhi kemajuan

sebuah organisasi adalah struktur organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Begitu juga pada organisasi KWT yang berfungsi sebagai wadah bagi ibu-ibu untuk menjalankan program KRPL, didalamnya juga terdapat struktur organisasi, sumber daya manusia dan juga sumber daya modal. Struktur organisasi dalam Kelompok Wanita Tani hampir sama dengan struktur organisasi pada umumnya yaitu, terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut: “dimulai dari rapat kecil terus membentuk kepengurusannya sekaligus seksi seksinya, seperti seksi pembibitan, seksi perikanan, seperti itu, jadi ada semacam pertemuan kecil gitu ya (wawancara pada tanggal 27 September 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).” Dalam penyusunan struktur organisasi KWT dimulai dengan rapat kecil, kemudian membentuk kepengurusan dalam KWT dan juga seksi-seksi yang dibutuhkan oleh KWT, seperti seksi pembibitan, seksi perikanan. Pernyataan dari Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Yulianto selaku PPL DKPP Kota Kediri yang bertugas di Kelurahan Rejomulyo sebagai berikut:

“Jadi kepengurusan itu dibentuk sesuai dengan tupoksinya masing masing, ada ketua, sekretaris, bendahara kemudian

anggota, kemudian ada seksi seksinya mas ya, seksi seksinya dibentuk untuk menaungi dan berkoordinasi sesuai dengan bidangnya masing masing. Untuk seksi tanaman pangan dan hortikultura ada sendiri, seksi perikanan ada sendiri, seksi peternakan ada sendiri, kemudian ada seksi pengolahan hasil yakni hasil diolah, kemudian ada seksi pemasaran (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL Melati Rejomulyo).” wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL Melati Rejomulyo).”

Struktur organisasi dalam KWT (kepengurusannya) dibentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi, diantaranya adalah ketua, sekretaris, bendahara, seksi tanaman pangan dan hortikultura, seksi perikanan, seksi peternakan, seksi pengolahan hasil, dan seksi pemasaran. Pembentukan seksi-seksi dalam KWT (Kelompok Wanita Tani) juga menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh kelompok, sehingga antar KWT yang satu dengan KWT yang lain mempunyai seksi-seksi yang berbeda juga.

SUSUNAN PENGURUS KRPL KWT " MELATI "	
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI	
PENYULUH PENDAMPING	: YULIYANTO
KETUA	: SITI MALIKAH
SEKRETARIS	: SRIANI CHOIRUNNISAK
BENDAHARA	: NUR HIDAYATI
SEKSI TANAMAN HORTIKULTURA	- UMI NADZIROH
	- SUTAMI
SEKSI PETENAKAN	- AMIN
	- SUTIANI
SEKSI PERIKANAN	- NUNUK SUNARSIH
	- TUTIK
SEKSI PEMASARAN	- FITRI
	- INAYAH
SEKSI PENGOLAHAN HASIL	- SUTIMAH
	- SUMIATI

Gambar 4.2 Struktur Organisasi KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Unsur kedua yang mempengaruhi organisasi KWT dalam menjalankan program KRPL sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya manusia yang ada pada Kelompok Wanita Tani (KWT). Pembentukan ataupun penataan kembali sumber daya manusia pada KWT dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi itu sendiri yang dilakukan melalui rapat kecil ataupun berkoordinasi dengan RT dan tokoh masyarakat setempat, serta adanya pembinaan dari Petugas Pelaksana Lapangan dari DKPP Kota Kediri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri “dimulai dari rapat kecil terus membentuk kepengurusannya sekaligus seksi seksinya, seperti seksi pembibitan, seksi perikanan, seperti itu, jadi ada semacam pertemuan kecil gitu ya (wawancara pada tanggal 27 September 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).” Pernyataan dari Ibu Sumarsih ini didukung pernyataan dari Bapak Yulianto selaku PPL DKPP yang bertugas di Kelurahan Rojomulyo Kota Kediri “Jadi kepengurusan itu dibentuk sesuai dengan tupoksinya masing masing, ada ketua, sekretaris, bendahara kemudian anggota, kemudian ada seksi seksinya mas ya, seksi seksinya dibentuk untuk menaungi dan berkoordinasi sesuai dengan bidangnya masing masing. (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL Melati Rejomulyo).” Berdasarkan pernyataan Ibu Sumarsih dan

Bapak Yulianto dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pada Kelompok Wanita Tani merupakan bagian dari pembentukan ataupun penataan kembali sumber daya manusia pada organisasi KWT yang menjalankan program KRPL sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Unsur yang terakhir yang mempengaruhi organisasi KWT dalam menjalankan program KRPL sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan adalah sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan program KRPL, karena tanpa modal program tidak akan bisa dijalankan. Dalam implementasi program KRPL sumber daya modal dibagi menjadi dua, yaitu mandiri dan bantuan. Sumber daya modal yang mandiri diperoleh dari iuran anggota KWT (mandiri), sedangkan yang bantuan berupa peralatan ataupun bibit diperoleh dari bantuan DKPP Kota Kediri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriyono selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri, sebagai berikut: “dana itu dirupakan dalam bentuk materi berupa greenhouse berupa benih, berupa alat-alat (wawancara pada tanggal 7 september 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).” Sumber daya modal yang berupa bantuan dari DKPP Kota Kediri untuk menjalankan program KRPL dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan diwujudkan dalam bentuk materi, seperti greenhouse, benih, bibit, dan lain sebagainya. Pernyataan

dari Bapak Yudhi Agustriono tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut:

kalau dananya itu ada yang mandiri ada yang bantuan ya mas, dana yang mandiri itu dari iurang anggota biasanya, kalau bantuan berupa barang seperti bibit tanaman, benih ikan, greenhouse, sama peralatan yang mendukung kayak pompa air, selang itu mas (wawancara pada tanggal 27 september 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).”

Sumber daya modal dalam menjalankan program KRPL untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat dibagi menjadi dua yaitu mandiri dan bantuan. Sumber daya modal mandiri diperoleh dari iuran anggota, sedangkan yang bantuan diperoleh dari DKPP Kota Kediri. Bantuan yang diperoleh dari DKPP diberikan dalam bentuk hibah berupa barang untuk kegiatan KRPL. Pernyataan Ibu Sumarsih tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Yulianto selaku PPL DKPP Kota Kediri yang bertugas di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri sebagai berikut: “bantuan hibah berupa barang untuk kegiatan KRPL, jadi berupa keperluan KRPL seperti bibit, polybag, sarpras ada ternak ada pakan terus ada untuk pembuatan kolam, fasilitas lah pokoknya (wawancara pada tanggal 20 september 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).” Sumber daya modal berupa bantuan yang diberikan oleh DKPP Kota Kediri untuk menjalankan program KRPL sebagai salah satu program untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan memberikan bantuan hibah berupa barang keperluan KRPL

seperti bibit, polybag, ternak (ayam, entok), pakan ternak, kolam, dan sarana prasarana yang mendukung berjalannya program KRPL untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pernyataan dari Bapak Yulianto tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Siti Malikh selaku Ketua KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri sebagai berikut:

“Dananya kita ada yang mandiri, ada yang mendapat dari dinas ketahanan pangan ada yang dari kelurahan. Kita mendapat dari yang DKPP berupa barang, tidak pernah yang berupa uang, misalnya benih terus polybag, pompa air, terus selang, tapi bantuan itu bukan untuk perorangan, tapi untuk kelompok. Untuk keberlanjutannya sebagian ada yang kita jual mas hasil panennya, terus bibit itu, uangnya kita masukkan kas (wawancara pada tanggal 20 september 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).”

Selain mendapat bantuan dari DKPP Kota Kediri untuk memenuhi kebutuhan, KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo melakukan penjualan sebagian hasil panen dan bibit. Pernyataan dari Ibu Siti Malikh tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu-ibu anggota KRPL KWT Melati sebagai berikut:

“Kalau sumber dananya ada yang mandiri ada yang sumbangan. Kalau modal awal dulu dari DKPP berupa barang tidak pernah berupa uang, seperti polybag, bibit. Kemudian kita kembangkan sendiri, dan sebagian dijual untuk kelanjutannya (wawancara pada tanggal 20 september 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).”

Setelah mendapatkan modal dari iuran anggota dan bantuan hibah barang dari DKPP Kota Kediri, KRPL KWT Melati Kelurahan

Rejomulyo mengembangkan sendiri modal yang diperoleh, dan untuk keberlanjutannya KRPL KWT Melati melakukan penjualan sebagian hasil panen dan penjualan bibit.



Gambar 4.3 Dokumentasi Panen Sayuran Kangkung KRPL KWT Melati.

Sumber: Dokumentasi KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo

b. Interpretasi Pelaksana Kebijakan

Suatu kebijakan ataupun program dalam pelaksanaannya atau dalam proses implementasinya memerlukan suatu interpretasi atau penafsiran dari para pelaksana kebijakan, karena dengan adanya interpretasi atau penafsiran yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan akan membuat implementasi sebuah kebijakan ataupun program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan dari kebijakan ataupun program itu sendiri dapat tercapai. Begitu juga dalam proses implementasi

program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan salah satu program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga juga memerlukan sebuah interpretasi atau penafsiran yang sama dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya interpretasi atau penafsiran yang sama dari para pelaksana kebijakan maka tujuan dari penerapan program KRPL dapat terwujud atau tercapai, tujuannya yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan ditingkat keluarga. Interpretasi atau penafsiran dari program KRPL itu sendiri adalah program dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah untuk ditanami kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriono selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut:

“KRPL yaitu pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk dipergunakan tanam menanam kebutuhan pokok yang mendukung kebutuhan keluarga. Misalnya lombok, terong, ternak ayam, kelinci. Jadi sifatnya ini sebagai pendukung untuk mengurangi beban keluarga. Kedua meningkatkan gizi keluarga. Ketiga untuk menambah cadangan pangan (wawancara pada tanggal 7 september 2017 di DKPP Kota Kediri).”

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriono Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga yang digunakan untuk menanam kebutuhan pokok yang mendukung atau menunjang kebutuhan

keluarga dan juga untuk pemeliharaan hewan ternak. Dengan adanya KRPL diharapkan dapat mengurangi beban keluarga, meningkatkan gizi keluarga, dan juga menambah cadangan pangan. Pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriono tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan Kota Kediri, sebagai berikut: “KRPL itu menurut saya program yang tujuannya itu mengurangi kerawanan pangan terutama di tingkat keluarga (wawancara pada tanggal 27 september 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).” Salah satu tujuan dari KRPL itu sendiri adalah untuk mengurangi kerawanan pangan di tingkat keluarga, mengurangi kerawanan pangan bisa diartikan sebagai terwujudnya ketahanan pangan di tingkat keluarga.

Pernyataan dari Ibu Sumarsih di atas didukung oleh pernyataan dari Bapak Yulianto selaku PPL DKPP Kota Kediri yang bertugas di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri sebagai berikut:

“KRPL itu pemanfaatan lahan pekarangan sekitar rumah programnya untuk ketahanan pangan dalam keluarga. Jadi terpenuhinya kecukupan gizi keluarga dari lingkungan sekitar kita. Termasuk sayur sayuran, protein hewani dari hasil unggas, ikan, jadi tujuannya seperti itu. Yang lebih lagi untuk mendekati apa yang diinginkan pemerintah yaitu pola makan harapan baik dengan motto B2SA yaitu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, jadi seperti itu (wawancara pada tanggal 20 september 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).”

KRPL merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan sekitar rumah yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan

ketahanan pangan dalam keluarga. Selain itu manfaat KRPL adalah untuk memenuhi gizi keluarga dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sesuai dengan harapan pemerintah yaitu terwujudnya makanan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

c. Aplikasi atau Penerapan Oleh Pelaksana Kebijakan

Aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan merupakan proses terjadinya implementasi sebuah kebijakan ataupun program. Aplikasi atau penerapan juga merupakan salah satu tahapan yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan atau program, dengan dilakukannya aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan maka sebuah kebijakan atau program sedang dilaksanakan atau dijalankan. Proses aplikasi atau penerapan dari program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan salah satu program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri dalam mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Walikota Kediri nomor 6 tahun 2013 tentang pedoman pengembangan model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Kediri. Namun dalam proses aplikasi atau penerapan dari program KRPL dalam mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan

pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriono selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut:

“Dalam penerapan program KRPL itu kita berpedoman pada perwali nomor 6 tahun 2013 tentang pedoman pengembangan model KRPL di Kota Kediri, tapi masih banyak yang nggak sesuai dengan harapan kita mas. KRPL itu kan merupakan program berupa bantuan mas ya, jadi kebanyakan dari kelompok KWT itu ada yang kalau sudah tidak dapat bantuan ya sudah mereka berhenti, hasilnya itu tidak diputar, tidak ada kelanjutannya. Tapi ada juga yang masih berjalan, seperti di Ketami dan Rejomulyo, mereka tetap jalan walaupun nggak ada bantuan. (wawancara pada tanggal 7 September 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).”

Menurut pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriono selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri penerapan program KRPL untuk mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga dijalankan dengan berpedoman pada peraturan Walikota Kediri nomor 6 tahun 2013 tentang pedoman pengembangan model KRPL di Kota Kediri. Namun seiring dengan berjalannya penerapan program KRPL yang dilaksanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari program KRPL. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari Kelompok Wanita Tani (KWT) yang telah dibentuk hanya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh DKPP, sehingga jika tidak mendapat bantuan dari DKPP maka program KRPL yang dijalankan oleh KWT tidak akan berlanjut. Namun hal ini tidak terjadi pada semua KWT yang ada, masih ada sebagian dari KWT yang tetap menjalankan program KRPL seperti

pada KWT yang ada di Kelurahan Ketami dan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

Selain permasalahan diatas, yang menyebabkan penerapan program KRPL untuk mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga yang dilakukan oleh DKPP Kota Kediri tidak berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan dari adanya program KRPL adalah belum adanya kesadaran dari masyarakat bahwa di dalam program KRPL terdapat manfaat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriyono selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut: “Selain itu seperti yang saya katakan tadi mereka masih beranggapan bahwa KRPL itu belum mendatangkan manfaat. Jadi rasa memilikinya itu kurang mas. (wawancara pada tanggal 7 September 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).” Sebagai besar dari KWT yang ada masih banyak yang beranggapan bahwa program KRPL yang dijalankan belum mendatangkan manfaat. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut:

“Tapi memang ya itu mas, kendalanya di masyarakatnya selama ini KRPL itu kan programnya karena ada bantuan, dan berdasar pantauan kami yang sudah ada, kalau berdasar bantuan itu kalau bantuan sudah habis ya sudah. Ini ini saya bicara riil aja mas ya, kalau bantuan sudah habis rata rata mereka ndak mau hasilnya itu diputar lagi, untuk memulai lagi. Tapi saya tidak semua KRPL bantuan itu seperti itu, ya ada yang tetep eksis itu tetap ada yang KRPL bantuan. (wawancara pada tanggal 27 September 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dalam penerapan program KRPL untuk mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga terdapat permasalahan yaitu adanya ketergantungan dari KWT terhadap bantuan yang diberikan oleh DKPP sehingga menyebabkan program KRPL tidak dapat berjalan jika tidak ada bantuan, tetapi hal ini tidak terjadi semua KWT yang ada, masih ada KWT yang tetap menjalankan program KRPL walupun tidak mendapatkan bantuan dari DKPP Kota Kediri.

2. Dampak Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

a. Dampak Ekonomi

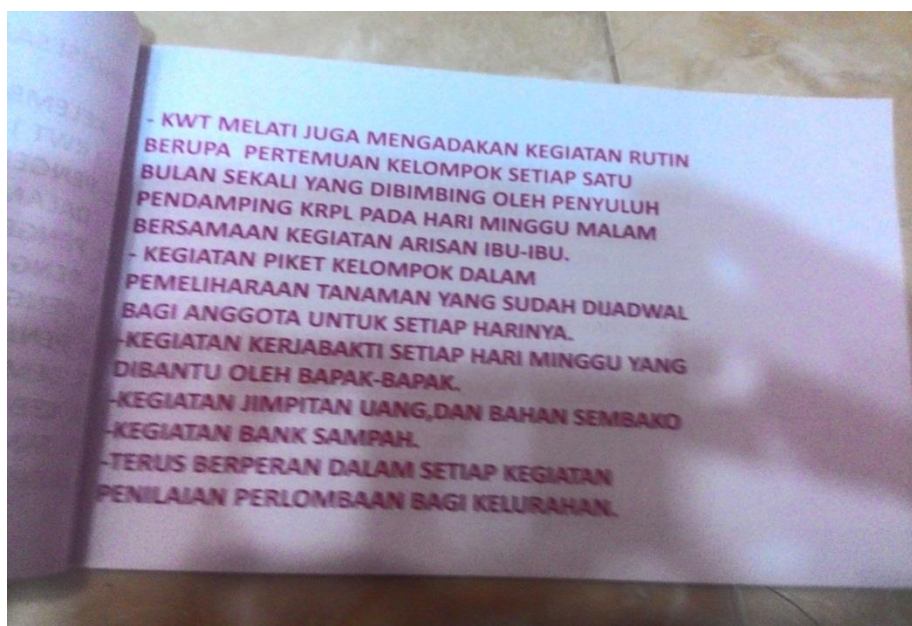
Dampak ekonomi merupakan perubahan yang terjadi setelah adanya implementasi program KRPL dalam bidang ekonomi, seperti mengurangi beban keluarga, karena untuk kebutuhan sayuran tidak harus membeli. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriyono selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut: “saya belum bisa menyampaikan dampak secara ekonomi itu berapa persen karena kami belum pernah melakukan penelitian itu, tapi yang jelas dampaknya bisa mengurangi beban keluarga, kalau kami itu. (wawancara pada tanggal 7 September 2017 di kantor DKPP Kota Kediri).” Berdasarkan pernyataan tersebut dampak dalam bidang ekonomi dari implementasi program KRPL

untuk mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan belum terukur secara jelas, namun dampak secara ekonominya dapat dirasakan secara langsung, yaitu dapat mengurangi beban keluarga. Pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriono tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri, berikut pernyataannya: “meningkatkan kesejahteraan anggotanya, saya ambil contoh mas ya, yang di KRPL bawang mereka kan dari hasil KRPL nya disana kebetulan ada pengusaha catering yang anggota KRPL itu sendiri, dan mereka kan bisa membeli lebih murah ya, dari hasil panen sendiri. (wawancara pada tanggal 27 September 2017 di kantor DKPP Kota Kediri).” Dampak ekonomi dari implementasi program KRPL adalah meningkatkan kesejahteraan anggota KWT dengan cara menjual hasil panen kepada anggota dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar.

Selain dengan menjual hasil panen yang lebih murah, dampak ekonomi dari implementasi program KRPL untuk mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan adalah adanya bank sampah dan juga simpan pinjam tanpa bunga untuk anggota KWT. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut: “Kalau di KRPL itu kan kegiatannya banyak mas, satu kayak ada semacam itu mas pengolahan sampah juga ada, ada bank sampah

dan uangnya itu diputar walaupun secara tidak langsung bisa meringankan beban anggotanya, seperti pinjaman tapi nggak usah pakai bunga (wawancara pada tanggal 27 September 2017 di kantor DKPP Kota Kediri).” Pernyataan dari ibu Sumarsih tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Yulianto selaku PPL DKPP Kota Kediri yang bertugas di Kelurahan Rejomulyo sebagai berikut: “dampak ekonominya yang jelas terjadi pengurangan biaya pengeluaran sehari-hari, tapi itu tidak signifikan ya mas. Selain itu dalam KRPL ini kan juga ada bank sampahnya, juga ada simpan pinjam tanpa bunga, sehingga tidak memberatkan anggota. (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).” Berdasarkan pernyataan tersebut dampak ekonomi dari implementasi program KRPL untuk mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan keluarga adalah mengurangi biaya pengeluaran sehari-hari, walaupun jumlahnya tidak signifikan, selain itu adanya bank sampah dan juga simpan pinjam anggota KWT juga menimbulkan dampak ekonomi. Pernyataan dari Bapak Yulianto tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu-ibu anggota KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri sebagai berikut: “secara tidak langsung kan membantu perekonomian kita, misalnya kalau butuh masak tinggal metik saja tidak perlu jauh-jauh ke pasar, tinggal ngambil di pekarangan (wawancara pada tanggal 20 September

2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).” Secara tidak langsung implementasi program KRPL memberikan dampak ekonomi bagi anggota KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo, karena dengan adanya KRPL akan membantu perekonomian anggota, seperti anggota tinggal memetik sayur di pekarangan rumah untuk memasak sehari-hari.



Gambar 4.4 Kegiatan KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo
Sumber: Profil KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo

b. Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan dampak atau perubahan yang terjadi dalam bidang sosial dan mempengaruhi lingkungan sosial di masyarakat. Dalam implementasi program KRPL untuk mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga yang dilakukan oleh DKPP Kota Kediri melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) juga menimbulkan dampak sosial di masyarakat, seperti

meningkatnya kerukunan dan silaturahmi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriyono selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut: “di dalamnya pada saat tertentu ada pengajiannya juga, selain itu juga ada wisata bersama-sama. Jadi secara sosial lebih bagus (wawancara pada tanggal 7 September 2017 di kantor DKPP Kota Kediri).” Meningkatnya kerukunan dan silaturahmi di masyarakat dapat terjadi karena di dalam organisasi KWT terdapat kegiatan pengajian dan juga wisata bersama yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Pernyataan dari Bapak Yudhi Agustriyono tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut: “kalau dampak sosialnya yang satu mempererat tali silaturahmi itu, terus itu tadi meringankan beban sesama anggotanya, terus apalagi ya, bisa berbagi ilmu ya yang jelas itu. (wawancara pada tanggal 27 September 2017 di kantor DKPP Kota Kediri).” Dampak sosial yang timbul dari implementasi program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan adanya program KRPL yang dijalankan oleh KWT dapat mempererat tali persaudaraan antar masyarakat dan juga sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran atau saling berbagi ilmu.

Pernyataan dari Ibu Sumarsih diatas diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Yulianto selaku PPL DKPP Kota Kediri

yang bertugas di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri sebagai berikut:

“dampak segi sosial banyak banget mas, terutama terjadi interaksi antara hubungan sosial antara keluarga kemudian bahwa masyarakat sekitar yang peduli akan KRPL walaupun mereka bukan anggota mereka akan tergerak untuk mengikuti, nah itu secara swadaya. interaksi terhadap sesamanya, kemudian mengeluarkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang positif. Jadi mereka mampu memberikan ilmunya kepada yang lainnya. Kemudian dari pihak lain juga mereka bisa pergi kesini untuk mengkaji KRPL yang ada di Rejomulyo ini (wawancara pada tanggal 20 September di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo).”

Berdasarkan pernyataan diatas dampak dari implementasi program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan dalam bidang sosial adalah adanya interaksi atau hubungan sosial antar keluarga sehingga dapat mempererat silaturahmi dan kerukunan di lingkungan masyarakat, selain itu dengan adanya program KRPL dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang positif serta wadah untuk saling bertukar pikiran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Siti Malikh selaku Ketua KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo, berikut pernyataannya: “untuk dampak sosialnya ya semakin bagus mas, karena kita kan sebagai ibu rumah tangga biasanya di dapur, dengan adanya KRPL ini kita jadi ada kegiatan, mempererat silaturahmi, tambah guyub rukun, bisa ketemu yang lain, bisa guyon guyon mas. (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di

KRPL Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).” Ibu Siti Malikh menjelaskan bahwa dengan adanya program KRPL menjadikan ibu-ibu rumah tangga memiliki kegiatan, selain itu juga dapat mempererat silaturahmi, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang guyub rukun. Pernyataan Ibu Siti Malikh tersebut didukung oleh pernyataan dari ibu-ibu anggota KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo sebagai berikut: “kerukunan meningkat mas, tiap hari kerjabhakti sampai malem malem sampai jam 10 jam 11, apalagi kalau pas mau ada lomba. Di dalamnya KRPL ini juga ada kegiatan lagi mas, kayak arisan, jimpitan, simpan pinjam. (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).” Adanya program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan menimbulkan dampak sosial yaitu dapat meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat, karena dengan adanya program KRPL menjadikan ibu-ibu rumah tangga memiliki kegiatan yang positif serta menjadikannya sebagai wadah untuk menambah wawasan dengan saling bertukar ilmu.



Gambar 4.5 Kerjabakti Pengisian kompos ke polybag KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017



Gambar 4.6 Pertemuan Rutin KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo

Sumber: Dokumentasi KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo

c. Dampak Lingkungan

Dampak terakhir yang timbul dari implementasi program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan adalah dampak di bidang lingkungan atau perubahan yang timbul pada lingkungan, seperti lingkungan menjadi asri atau menjadi indah dan juga memberikan kesehatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sumarsih selaku Kepala Seksi Distribusi Pangan DKPP Kota Kediri sebagai berikut: “satu kawasan menjadi asri itu jelas, terus apa namanya sehat karena sayuran yang ditanam tidak menggunakan pestisida, lingkungan jadi indah. Yang jelas lingkungannya menjadi asri indah, yang jelas seperti itu. (wawancara pada tanggal 27 September 2017 di Kantor DKPP Kota Kediri).” Adanya implementasi program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan menimbulkan dampak pada lingkungan yaitu lingkungan atau kawasan yang dijadikan sebagai tempat KRPL menjadi asri karena banyak tanaman terutama jenis sayuran yang ditanam disekitar lingkungan masyarakat yang menjalankan program KRPL melalui KWT, selain itu lingkungan juga menjadi indah, karena sayuran yang ditanam tidak asal menanam tetapi juga ditata agar rapi dan nyaman untuk dipandang. Dampak lingkungan yang lain dari implementasi program KRPL untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan adalah memberikan kesehatan pada

anggota, karena dalam penerapannya sayuran yang ditanam untuk program KRPL tidak menggunakan pestisida, sehingga aman atau sehat untuk dikonsumsi.

Pernyataan Ibu Sumarsih diatas didukung oleh pernyataan dari Bapak Yulianto selaku PPL DKPP Kota Kediri yang bertugas di Kelurahan Rejomulyo, berikut pernyataannya:

“dampak lingkungan sangat signifikan banget, kenapa dengan menanam kita mengajari prinsip bebas pestisida jadi terhadap kesehatan lingkungan sangat bagus. Masyarakat semakin memahami arti pentingnya hidup sehat. Kemudian dengan banyak tanaman banyak oksigen sehingga terjadi sirkulasi udara yang baik bagi kesehatan yang kedua lingkungan menjadi asri, menjadi teduh kemudian dari segi lingkungan orang melihat lingkungan kita itu merasa tenang (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).”

Adanya implementasi program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan yaitu, program KRPL menerapkan konsep menanam yang bebas pestisida, sehingga lingkungan menjadi sehat dan juga hasil panen dari KRPL aman dan sehat untuk dikonsumsi, dengan menerapkan konsep tanaman bebas pestisida juga mengajarkan kepada masyarakat akan arti pentingnya hidup sehat. Selain itu dampak lingkungan yang timbul dari implementasi program KRPL adalah banyaknya tanaman yang ditanam akan membuat lingkungan menjadi asri, teduh dan indah, hal ini menjadikan seseorang yang berada di lingkungan KRPL menjadi tenang. Pernyataan dari Bapak Yulianto tersebut diperkuat oleh

pernyataan dari Ibu Siti Malikh selaku Ketua KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, berikut pernyataannya: “dampak lingkungannya ya lingkungan kita semakin kelihatan hijau mas, udaranya semakin segar, kalau ada tanaman seperti ini kan dipandang enak tidak panas. (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).” Dampak lingkungan dari adanya implementasi program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan menurut Ibu Siti Malikh adalah menjadikan lingkungan kelihatan hijau, dan adanya banyak tanaman yang ditanam membuat udara menjadi segar serta menjadikan lingkungan semakin sejuk. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu-ibu anggota KRPL KWT Melati Rejomulyo Kota Kediri sebagai berikut: “lingkungan kan jadi hijau, asri, sejuk, dan sayur yang kita tanam bebas pestisida, di KRPL ini juga ada bank sampahnya. (wawancara pada tanggal 20 September 2017 di KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri).” Implementasi program KRPL menjadikan lingkungan di sekitar KRPL menjadi hijau, asri, dan sejuk. Selain itu sayuran yang ditanam di KRPL juga bebas pestisida, sehingga membuat lingkungan sehat serta hasil panen menjadi aman dan sehat untuk dikonsumsi.



Gambar 4.7 Kebun KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017



Gambar 4.8 Kawasan Rumah Pangan Lestari KWT Melati
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

C. Analisa Data

1. Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

a. Organisasi Pelaksana Kebijakan

Organisasi merupakan suatu unsur yang penting dalam sebuah pelaksanaan atau penerapan sebuah kebijakan, karena dengan dibentuknya organisasi maka akan berpengaruh pada implementasi suatu program. Menurut Jones (1991:296) dalam suatu organisasi yang mempengaruhi implementasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya dalam suatu organisasi telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri. Untuk menjalankan salah satu program yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, yaitu melalui pengembangan program KRPL DKPP Kota Kediri akan membentuk organisasinya terlebih dahulu yang anggotanya diambil dari ibu-ibu yang masuk dalam kelompok dasawisma didampingi oleh Petugas Pelaksana Lapangan (PPL) yang telah ditugaskan di setiap kelurahan yang ada di Kota Kediri. Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok dasawisma akan dibuatkan organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT) yang akan menjalankan program KRPL di masing-masing kelurahannya.

Kelompok dasawisma merupakan kelompok yang terdiri dari 10 rumah yang masing-masing rumah membuat RPL (Rumah Pangan Lestari), karena untuk membuat sebuah Kawasan Rumah Pangan Lestari minimal harus ada 10 rumah yang sudah menjalankan RPL. Kemudian ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok dasawisma membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dijadikan sebagai organisasi dalam menjalankan program KRPL. Dengan adanya kelompok dasawisma yang kemudian tergabung dalam organisasi KWT diharapkan antar rumah yang menerapkan Rumah Pangan Lestari (RPL) bisa saling bekerjasama sehingga bisa mewujudkan sebuah Kawasan Rumah Pangan Lestari, karena KRPL itu sendiri merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari minimal 10 rumah.

Kelompok Wanita Tani (KWT) dibentuk sebagai wadah untuk melaksanakan program KRPL. Pembentukan KWT itu sendiri juga melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah setempat, selain itu dalam pembentukan KWT juga didampingi oleh PPL dari DKPP. Setelah KWT terbentuk, kelurahan setempat harus membuatkan Surat Keputusan (SK) agar KWT yang telah terbentuk diakui keberadaannya, baru setelah itu PPL memberikan penyuluhan tentang program KRPL dan juga tata cara pengelolaannya.

Pada sebuah organisasi di dalamnya juga terdapat unsur-unsur yang menunjang jalannya organisasi dan juga akan menentukan maju atau tidaknya sebuah organisasi. Seperti yang telah dikatakan oleh Jones (1991:296) dalam suatu organisasi yang mempengaruhi implementasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Penataan kembali sumberdaya dilakukan dengan cara membentuk struktur organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya manusia, dan sumber daya modal.

Pada organisasi KWT yang berfungsi sebagai wadah bagi ibu-ibu untuk menjalankan program KRPL, didalamnya juga terdapat struktur organisasi, sumber daya manusia dan juga sumber daya modal. Struktur organisasi dalam Kelompok Wanita Tani hampir sama dengan struktur organisasi pada umumnya yaitu, terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang dibutuhkan. Struktur organisasi dalam KWT (kepengurusannya) dibentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi, diantaranya adalah ketua, sekretaris, bendahara, seksi tanaman pangan dan hortikultura, seksi perikanan, seksi peternakan, seksi pengolahan hasil, dan seksi pemasaran. Pembentukan seksi-seksi dalam KWT (Kelompok Wanita Tani) juga menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh kelompok, sehingga antar KWT yang satu dengan KWT yang lain mempunyai seksi-seksi yang berbeda juga.

Pembentukan atau penataan kembali sumber daya manusia yang ada pada Kelompok Wanita Tani (KWT) juga mempengaruhi organisasi KWT dalam menjalankan program KRPL sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan. Pembentukan ataupun penataan kembali sumber daya manusia pada KWT dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi itu sendiri yang dilakukan melalui rapat kecil ataupun berkoordinasi dengan RT dan tokoh masyarakat setempat, serta adanya pembinaan dari Petugas Pelaksana Lapangan (PPL) dari DKPP Kota Kediri. Sehingga pembentukan struktur organisasi pada Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan bagian dari pembentukan ataupun penataan kembali sumber daya manusia pada organisasi KWT yang menjalankan program KRPL sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Terakhir yang mempengaruhi organisasi KWT dalam menjalankan program KRPL sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan adalah sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan program KRPL, karena tanpa modal program tidak akan bisa dijalankan. Dalam implementasi program KRPL sumber daya modal dibagi menjadi dua, yaitu mandiri dan bantuan. Sumber daya modal yang mandiri diperoleh dari iuran anggota KWT (mandiri), sedangkan yang bantuan berupa peralatan ataupun bibit diperoleh dari bantuan DKPP Kota Kediri.

Sumber daya modal berupa bantuan yang diberikan oleh DKPP Kota Kediri untuk menjalankan program KRPL sebagai salah satu program untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan memberikan bantuan hibah berupa barang keperluan KRPL seperti bibit, polybag, ternak (ayam, entok), pakan ternak, kolam, dan sarana prasarana yang mendukung berjalannya program KRPL untuk mewujudkan ketahanan pangan. Setelah mendapatkan modal dari iuran anggota dan bantuan hibah barang dari DKPP Kota Kediri, KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo mengembangkan sendiri modal yang diperoleh, dan untuk keberlanjutannya KRPL KWT Melati melakukan penjualan sebagian hasil panen dan penjualan bibit.

Menurut Jones (1991:296) dalam suatu organisasi yang mempengaruhi implementasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. DKPP Kota Kediri yang dalam hal ini seharusnya menjadi aktor dari pelaksanaan program KRPL masih belum memahami fungsinya sebagai aktor atau pelaksana kebijakan, dan DKPP menganggap bahwa aktor atau pelaksana dari program KRPL adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berada di setiap kelurahan. Sedangkan yang menjadi sasaran atau objek dari program KRPL untuk mewujudkan ketahanan pangan harusnya adalah kelompok masyarakat atau KWT itu sendiri. Oleh sebab itu

perlu pemahaman bagi DKPP, untuk memisahkan siapa yang menjadi aktor atau pelaksana kebijakan dan siapa yang menjadi objek atau sasaran dari program KRPL.

Selain itu, seperti yang telah di katakan oleh Jones (1991: 296) bahwa yang menjadikan implementasi dapat berjalan adalah pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Memang DKPP telah membentuk KWT sebagai sasaran dari program KRPL namun penataan dari sumberdaya dalam KWT masih belum jelas, seperti kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa DKPP hanya melakukan pembentukan organisasi saja, tidak ada penataan sumberdaya yang jelas, misalnya seperti ada pelatihan khusus untuk pengurus KWT mengenai organisasi dan juga pendampingan untuk membuat program. Selain itu DKPP juga masih belum mempunyai metode agar program KRPL untuk mewujudkan ketahanan pangan bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, sehingga hal ini menjadikan banyak kelompok yang masih belum memahami tujuan dari adanya program KRPL. Dan hal inilah yang membuat sebagian besar KRPL yang berada di Kota Kediri tidak berjalan, oleh sebab itu diperlukan metode ataupun strategi agar KRPL yang telah ada tetap bisa berjalan dan bertahan.

b. Interpretasi Pelaksana Kebijakan

Menurut Jones (1991:296) interpretasi merupakan proses menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Sehingga dalam proses implementasi kebijakan ataupun program memerlukan suatu interpretasi atau penafsiran dari para pelaksana kebijakan, karena dengan adanya interpretasi atau penafsiran yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan akan membuat implementasi sebuah kebijakan ataupun program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan dari kebijakan ataupun program itu sendiri dapat tercapai.

Proses implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan salah satu program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga juga memerlukan sebuah interpretasi atau penafsiran yang sama dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya interpretasi atau penafsiran yang sama dari para pelaksana kebijakan maka tujuan dari penerapan program KRPL dapat terwujud atau tercapai, tujuannya yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan ditingkat keluarga. Interpretasi atau penafsiran dari program KRPL itu sendiri adalah program dari pemerintah untuk meningkatkan

ketahanan pangan di tingkat keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah untuk ditanami kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran.

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga yang digunakan untuk menanam kebutuhan pokok yang mendukung atau menunjang kebutuhan keluarga dan juga untuk pemeliharaan hewan ternak. Dengan adanya KRPL diharapkan dapat mengurangi beban keluarga, meningkatkan gizi keluarga, dan juga menambah cadangan pangan. Salah satu tujuan dari KRPL itu sendiri adalah untuk mengurangi kerawanan pangan di tingkat keluarga, mengurangi kerawanan pangan bisa diartikan sebagai terwujudnya ketahanan pangan di tingkat keluarga. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa KRPL merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan sekitar rumah yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dalam keluarga. Selain itu manfaat KRPL adalah untuk memenuhi gizi keluarga dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sesuai dengan harapan pemerintah yaitu terwujudnya makanan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Adanya interpretasi sebuah kebijakan ataupun program diharapkan bisa untuk menyamakan persepsi agar kebijakan ataupun program bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Menurut

Jones (1991:296) interpretasi merupakan proses menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Namun dalam melakukan interpretasi atau penafsiran program KRPL untuk mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan DKPP hanya melakukannya di lingkup dinas saja, sebagian besar Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berfungsi sebagai objek atau sasaran dari program KRPL untuk mewujudkan ketahanan pangan masih banyak yang belum mengetahui apa makna dari program KRPL itu sendiri, hal ini seperti hasil pengamatan dari peneliti bahwa yang diketahui oleh KWT, program KRPL adalah tanam menanam sayuran, tanpa mengetahui apa tujuan dari adanya program KRPL, sehingga tujuan dari adanya program KRPL masih belum bisa maksimal. Selain itu DKPP Kota Kediri juga tidak melibatkan pemerintah kelurahan dan tim penggerak PKK dalam proses interpretasi program KRPL. Pelibatan pemerintah kelurahan dan tim penggerak PKK di tingkat kelurahan perlu dilakukan karena lokasi dari pelaksanaan program KRPL berada di tingkat kelurahan sehingga kelurahan bisa ikut untuk membantu melaksanakan program KRPL yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sedangkan pelibatan tim penggerak PKK perlu dilakukan karena yang menjadi sasaran atau objek dari program KRPL sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga, dengan

dilibatkannya tim penggerak PKK yang berada di kelurahan dapat memudahkan proses sosialisasi dari tujuan adanya program KRPL. Selain itu dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan tim penggerak PKK menunjukkan bahwa ada komunikasi dan sinergitas antara DKPP dengan Kelurahan dan juga penggerak PKK.

c. Aplikasi atau Penerapan Oleh Pelaksana Kebijakan

Aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan merupakan proses terjadinya implementasi sebuah kebijakan ataupun program. Aplikasi atau penerapan juga merupakan salah satu tahapan yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan atau program, dengan dilakukannya aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan maka sebuah kebijakan atau program sedang dilaksanakan atau dijalankan.

Menurut Jones (1991:296) aplikasi atau penerapan oleh pelaksana kebijakan merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Proses aplikasi atau penerapan dari program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan salah satu program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri dalam mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Walikota Kediri nomor 6 tahun 2013

tentang pedoman pengembangan model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Kediri. Namun dalam proses aplikasi atau penerapan dari program KRPL dalam mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari Kelompok Wanita Tani (KWT) yang telah dibentuk hanya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh DKPP, sehingga jika tidak mendapat bantuan dari DKPP maka program KRPL yang dijalankan oleh KWT tidak akan berlanjut. Namun hal ini tidak terjadi pada semua KWT yang ada, masih ada sebagian dari KWT yang tetap menjalankan program KRPL seperti pada KWT yang ada di Kelurahan Ketami dan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

Belum adanya kesadaran dari masyarakat bahwa di dalam program KRPL terdapat manfaat juga menjadi masalah dalam penerapan atau aplikasi program KRPL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan program KRPL untuk mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena masih terdapat permasalahan yaitu adanya ketergantungan dari KWT terhadap bantuan yang diberikan oleh DKPP sehingga menyebabkan program KRPL tidak dapat berjalan jika tidak ada bantuan, tetapi hal ini tidak terjadi semua KWT yang ada, masih

ada KWT yang tetap menjalankan program KRPL walupun tidak mendapatkan bantuan dari DKPP Kota Kediri, dan juga belum adanya kesadaran dari masyarakat bahwa di dalam program KRPL terdapat manfaat.

Selain itu dalam penerapan atau aplikasi program KRPL untuk mewujudkan ketahanan pangan DKPP Kota Kediri hanya melakukan aplikasi saja, yaitu pemberian bantuan berupa peralatan untuk KRPL seperti mesin pompa air, selang, green house, polybag, bibit, dan lain sebagainya. Untuk keberlanjutan dari program KRPL itu sendiri masih belum dilakukan, seharusnya setelah melakukan aplikasi program KRPL DKPP Kota Kediri harus melakukan pemantauan dan juga pendampingan kemudian melakukan evaluasi secara bertahap misalnya setiap tri wulan sekali, selain itu DKPP Kota Kediri juga perlu untuk membuat inovasi agar KRPL tetap berjalan, seperti membuat wisata edukasi ataupun bazar hasil KRPL, dan juga melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar hasil dari KRPL di pasarkan.

2. Dampak Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

a. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi merupakan perubahan yang terjadi di bidang ekonomi setelah adanya implementasi sebuah kebijakan ataupun program. Menurut Saptana (2012:21) dampak ekonomi

dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah dapat menghemat pengeluaran rumah tangga dan pemenuhan konsumsi sayuran. Dampak dalam bidang ekonomi dari implementasi program KRPL yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri serta Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan belum terukur secara jelas, namun dampak secara ekonominya dapat dirasakan secara langsung, yaitu dapat mengurangi beban keluarga, hal ini bisa terjadi karena KWT menjual hasil panen kepada anggota dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar, sehingga bisa mengurangi pengeluaran untuk belanja sehari-hari.

Selain dengan menjual hasil panen yang lebih murah, dampak ekonomi dari implementasi program KRPL untuk mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan adalah adanya bank sampah dan juga simpan pinjam tanpa bunga untuk anggota KWT. Secara tidak langsung implementasi program KRPL memberikan dampak ekonomi bagi anggota KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo, karena dengan adanya KRPL akan membantu perekonomian anggota, seperti anggota tinggal memetik sayur di pekarangan rumah untuk memasak sehari-hari.

Namun dampak ekonomi dari adanya program KRPL ini hanya dirasakan oleh anggota kelompok saja, tidak semua

masyarakat yang berada di lingkungan yang menjalankan program KRPL merasakan dampak ekonominya. Oleh sebab itu DKPP Kota Kediri dan juga PPL yang berada di lapangan perlu melakukan sosialisasi agar semua masyarakat ikut melaksanakan program KRPL yang tujuannya untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan terutama di tingkat keluarga.

b. Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan dampak atau perubahan yang terjadi dalam bidang sosial dan mempengaruhi lingkungan sosial di masyarakat. Menurut Saptana (2012:21) dampak sosial dari implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah adanya perubahan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Dalam implementasi program KRPL untuk mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga yang dilakukan oleh Dinas Keahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) juga menimbulkan dampak sosial di masyarakat, seperti meningkatnya kerukunan dan silaturrahi. Meningkatnya kerukunan dan silaturrahi di masyarakat dapat terjadi karena di dalam organisasi KWT terdapat kegiatan pengajian dan juga wisata bersama yang bertujuan untuk mempererat tali silaturrahi.

Selain itu dengan adanya program KRPL dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang positif

seperti kegiatan menanam sayuran dan perawatannya, selain itu juga sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran. Implementasi program KRPL memberikan dampak sosial bagi anggota KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo, karena dengan adanya KRPL dapat meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat, menjadikan ibu-ibu rumah tangga memiliki kegiatan yang positif, serta sebagai wadah untuk menambah wawasan dengan saling bertukar ilmu. Selain itu adanya program KRPL menjadikan masyarakat mengetahui manfaat dari setiap jenis sayuran yang ditanam di kebun KRPL.

Selain dampak positif, berdasarkan fakta yang ada dilapangan juga menimbulkan dampak negatif, yaitu adanya masyarakat yang kontra dengan adanya program KRPL, dan mempengaruhi yang lain agar tidak ikut dalam KWT, sehingga menjadikan kerukunan di masyarakat terpecah. Kerukunan meningkat hanya untuk masyarakat yang tergabung dalam KWT saja. Oleh sebab itu sinergitas antara DKPP Kota Kediri dengan pemerintah kelurahan dan juga tom penggerak PKK sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan di masyarakat.

c. Dampak Lingkungan

Dampak terakhir yang timbul dari implementasi program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan adalah dampak di bidang lingkungan atau perubahan yang timbul

pada lingkungan. Menurut Saptana (2012:21) dampak lingkungan yang terjadi karena adanya implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah adanya pengolahan limbah rumah tangga, memberikan keindahan dan memberikan kesehatan. Dalam imlementasi program KRPL yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) belum bisa mewujudkan aspek yang pertama yaitu adanya pengolahan limbah rumah tangga.

Adanya implementasi program KRPL untuk meningkatkan atau mewujudkan ketahanan pangan menimbulkan dampak pada lingkungan yaitu lingkungan atau kawasan yang dijadikan sebagai tempat KRPL menjadi asri karena banyak tanaman terutama jenis sayuran yang ditanam disekitar lingkungan masyarakat yang menjalankan program KRPL melalui KWT, selain itu lingkungan juga menjadi indah, karena sayuran yang ditanam tidak asal menanam tetapi juga ditata agar rapi dan nyaman untuk dipandang. Dampak lingkungan yang lain dari implementasi program KRPL untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan adalah memberikan kesehatan pada anggota, karena dalam penerapannya sayuran yang ditanam untuk program KRPL tidak menggunakan pestisida, sehingga aman atau sehat untuk dikonsumsi.

Program KRPL menerapkan konsep menanam yang bebas pestisida, sehingga lingkungan menjadi sehat dan juga hasil panen dari KRPL aman dan sehat untuk dikonsumsi, dengan menerapkan konsep tanaman bebas pestisida juga mengajarkan kepada masyarakat akan arti pentingnya hidup sehat. Selain itu dampak lingkungan yang timbul dari implementasi program KRPL adalah banyaknya tanaman yang ditanam akan membuat lingkungan menjadi asri, teduh dan indah, hal ini menjadikan seseorang yang berada di lingkungan KRPL menjadi tenang. Implementasi program KRPL memberikan dampak lingkungan bagi anggota KRPL KWT Melati Kelurahan Rejomulyo, adanya program KRPL menjadikan lingkungan di sekitar KRPL menjadi hijau, asri, dan sejuk. Selain itu sayuran yang ditanam di KRPL juga bebas pestisida, sehingga membuat lingkungan sehat serta hasil panen menjadi aman dan sehat untuk dikonsumsi.